

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSRENBANGDES DI
DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ALFI ZUMERI
NIM: 190801078

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Alfi Zumeri

NIM : 190801078

Tempat/Tanggal Lahir : Keramat Jaya/14 Januari 2000

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSRENBANGDES DI
DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 24, Juni 2026

Yang menyatakan,



Alfi Zumeri

Alfi Zumeri
NIM. 190801078

**“PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSRENBANGDES DI DESA
KERAMAT JAYA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

ALFI ZUMERI

190801078

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Banda Aceh, 22 Juni 2026

Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Ramzi Murziqin, M.A.

NIP. 198810062019032009

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSRENBANGDES DI
DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar (S1) Dalam Ilmu Politik

Diajukan Oleh :

ALFI ZUMERI

190801078

Pada Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Ramzi Murzidin, M.A.

NIP. 198810062019032009

Sekretaris,

Syafiur Rahman S.A.P

Penguji I,

Eka Januar. M.Soc.Sc

NIP. 198401012015031003

Penguji II,

Arif Akbar, M.A

NIP. 199110242022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-RANIRY Banda Aceh



Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag.

197403271999031005

ABSTRAK

PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSRENBANGDES DI DESA KERAMAT JAYA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

Nama Mahasiswa / NIM : ALFI ZUMERI / 190801078
Program Studi : Ilmu Politik
Topik : Partisipasi Politik

Abstrak

Partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif. Namun, keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemuda yang terlibat dalam Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda diwujudkan melalui kehadiran dalam Musrenbangdes, penyampaian usulan, serta keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa. Namun, tingkat partisipasi pemuda masih tergolong sedang dan belum sepenuhnya memengaruhi proses pengambilan keputusan. Faktor pendukung partisipasi meliputi kesadaran pemuda, dukungan pemerintah desa, dan keberadaan organisasi kepemudaan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman mengenai Musrenbangdes, keterbatasan informasi, kesibukan pekerjaan, dan rendahnya kepercayaan diri pemuda dalam menyampaikan pendapat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan pemuda sehingga tercipta pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Partisipasi Pemuda, Musrenbangdes, Pembangunan Desa, Desa Keramat Jaya, Pemuda.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “partisipasi pemuda dalam musrenbangdes di desa keramat jaya kecamatan bandar kabupaten bener meriah” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan peradaban.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, arahan, serta motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Ilmu Politik beserta seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pelayanan selama masa perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan kesempatan, informasi, dan bantuan selama proses pengumpulan data.

6. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ayahku (Yusnaidi) beliau mungkin tidak dapat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, Namun beliau mengusahakan semuanya agar Anak-Anaknya dapat duduk di bangku perguruan tinggi guna mencapai cita-cita, Semua tenaga beliau kerahkan untuk memfasilitasi dan mendanai semasa penulis dari kecil hingga di masa sekarang(berkuliah).
7. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Ibunda cinta pertamaku (Nur'Aini), Terimakasih atas segala kebaikan yang di berikan mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, menjaga, mendidik dengan penuh kesabaran, memandirikan, dan yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis dalam setiap situasi.dan terimakasih juga untuk segala dukungan dan semangat yang tiada hemti di berikan agar prnulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak kakak, dan abang (Ely suryani,Desy yuliani,Sandika Pitra), Terimakasih karena sudah menyemangati penulis hingga pada penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu referensi yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik

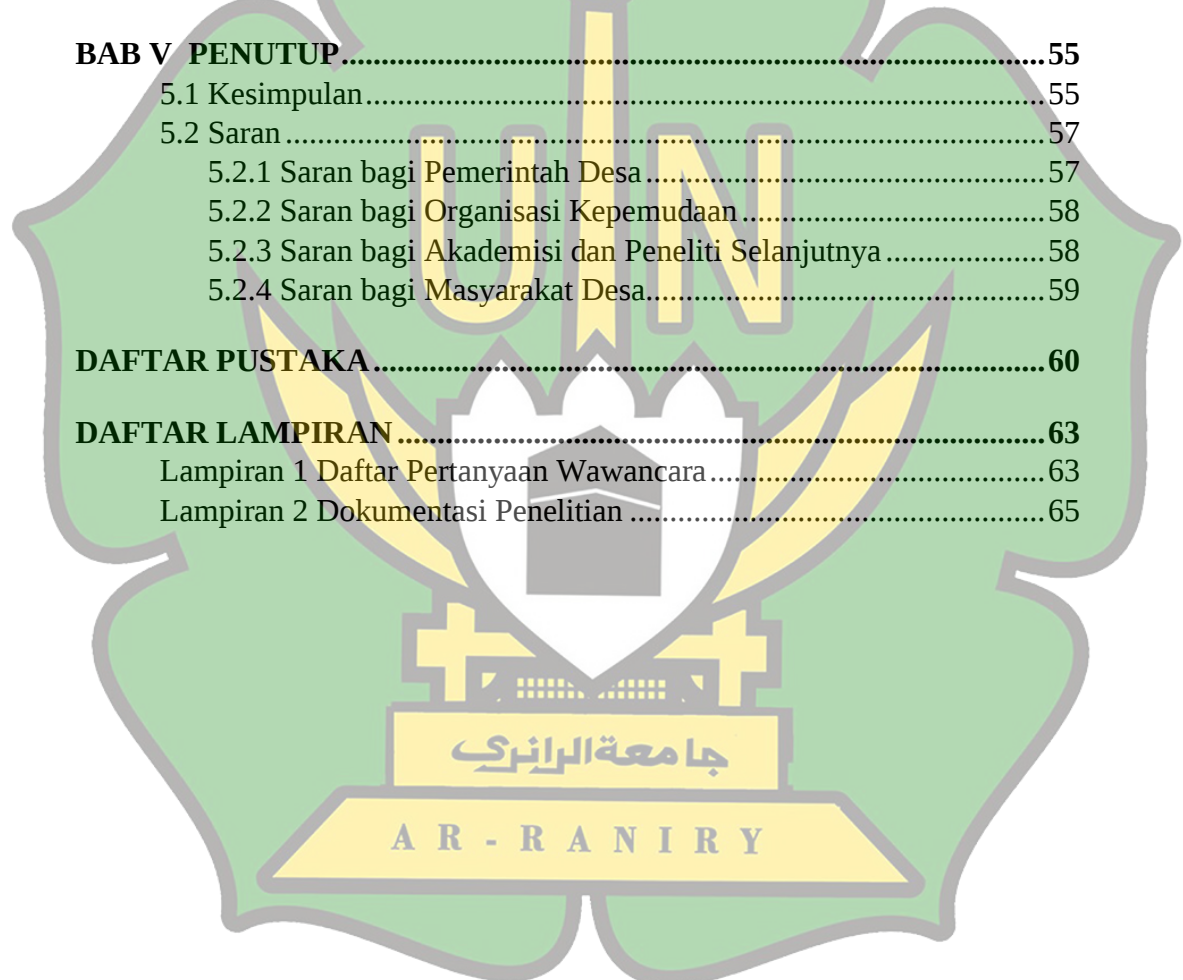
Banda Aceh,18 juni 2026

Alfi Zumeri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	IV
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Identifikasi Dan Rumusan Masalah.....	5
1.3.1 Identifikasi	5
1.4 Fokus Penelitian	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.6.1 Manfaat Secara Teoritis.....	7
1.6.2 Manfaat bagi dunia praktis	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	13
2.2.1 Teori Partisipasi.....	13
2.2.2 Teori Partisipasi Pemuda	14
2.2.3 Teori Tingkatan Partisipasi Masyarakat	15
2.3 Kerangka Berpikir	19
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 20
3.1 Metode Dan Jenis Penelitian	20
3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3 Jenis Penelitian	21
3.4 Informan Penelitian	21
3.4.1 Tabel Informan Penelitian	21
3.5 Metode Dan Jenis Penelitian	22
3.5.1 Melalui Wawancara.....	22
3.5.2 Melalui Dokumentasi	22
3.5.3 Melalui Kepustakaan	23
3.5.4 Melalui Observasi.....	23
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 24
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	24
4.2 Hasil Temuan Penelitian.....	32

4.2.1 Bentuk Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes	32
4.2.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes	38
4.3 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes	41
4.3.1 Faktor Pendorong Partisipasi Pemuda	41
4.3.2 Faktor Penghambat Partisipasi Pemuda	43
4.4 Pembahasan	44
4.4.1 Analisis Temuan Berdasarkan Teori Partisipasi	44
4.4.2 Analisis Temuan Teori Partisipasi Pemuda	47
4.4.3 Analisi Temuan Teori Tingkatan Partisipasi Masyarakat	51
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	57
5.2.1 Saran bagi Pemerintah Desa	57
5.2.2 Saran bagi Organisasi Kepemudaan	58
5.2.3 Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya	58
5.2.4 Saran bagi Masyarakat Desa	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR LAMPIRAN	63
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	63
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kerangka Berfikir

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Secara Umum Tahun 2026

Tabel 4.2 Infrastruktur Fasilitas Desa Keramat Jaya Tahun 2026



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan mekanisme penting dalam sistem tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Melalui Musrenbangdes, aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan masyarakat dibawa ke forum perencanaan sehingga perencanaan desa diharapkan bukan hanya atas inisiatif pemerintah desa tapi juga refleksi nyata dari keinginan warga desa.

Di Kabupaten Bener Meriah, khususnya di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar, isu partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes menjadi penting untuk dikaji karena pembangunan desa memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes masih belum optimal. Sebagian pemuda belum aktif menghadiri forum musyawarah, sementara sebagian lainnya hadir tetapi belum berpartisipasi secara aktif dalam penyampaian pendapat maupun perumusan usulan pembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan pemuda dalam forum Musrenbangdes belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang substantif.

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes; (2) faktor pengaruh baik internal (misalnya motivasi, pengetahuan, akses informasi) maupun eksternal (dukungan pemerintah desa, budaya lokal, anggaran, transparansi); dan (3) hambatan yang spesifik yang dihadapi pemuda di Desa Keramat Jaya. Alasan pentingnya meneliti hal ini adalah karena partisipasi pemuda bukan hanya soal inklusi sosial, tetapi juga soal efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan pembangunan desa.

Jika dibandingkan dengan Desa Bale Atu yang berada di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, kondisi partisipasi pemuda di Desa Keramat Jaya menunjukkan karakteristik yang berbeda. Desa Bale Atu memiliki akses yang lebih dekat terhadap berbagai program pemerintah, pendampingan

desa, serta aktivitas organisasi kepemudaan sehingga peluang keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pembangunan relatif lebih besar. Sebaliknya, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Keramat Jaya, keikutsertaan pemuda dalam Musrenbangdes masih belum optimal. Kehadiran pemuda dalam forum musyawarah belum diikuti oleh keterlibatan aktif dalam proses penyampaian usulan maupun pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ruang partisipasi yang tersedia belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), sehingga perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan pemuda dalam Musrenbangdes.

Dalam kerangka partisipasi pembangunan desa, studi di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah menghadirkan nuansa yang cukup khas: meskipun forum musyawarah pembangunan (*Musrenbang*) secara formal dirancang untuk menampung aspirasi seluruh warga, termasuk generasi pemuda, realitas lokal menunjukkan bahwa dominasi tokoh tua dan tradisi religius kuat masih menjadi penghalang terselubung bagi partisipasi aktif kaum muda.

Dalam praktiknya, kualitas Musrenbangdes sangat ditentukan oleh keberagaman aktor yang terlibat. Semakin luas keterwakilan masyarakat dalam forum tersebut, maka semakin besar peluang lahirnya keputusan pembangunan yang mencerminkan kebutuhan seluruh kelompok sosial. Salah satu kelompok strategis yang seharusnya memperoleh ruang partisipasi yang memadai adalah pemuda. Kehadiran pemuda dalam Musrenbangdes bukan hanya sebagai peserta formal, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*), agen pembangunan (*agent of development*), dan agen kontrol sosial (*agent of social control*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.¹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya problem gap, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh unsur masyarakat dengan kondisi empiris di lapangan yang

¹ Regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

masih memperlihatkan rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses Musrenbangdes. Selain itu, terdapat research gap karena sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas partisipasi masyarakat secara umum, efektivitas Musrenbang, tata kelola pemerintahan desa, atau partisipasi kelompok tertentu seperti perempuan, sedangkan penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Kabupaten Bener Meriah masih sangat terbatas. Di sisi lain, terdapat pula kesenjangan bukti, yaitu belum tersedianya bukti empiris yang menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk partisipasi pemuda, faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka, serta hambatan sosial yang dihadapi dalam forum Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya.

Pemuda memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Mereka cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, lebih kreatif dalam menghasilkan inovasi, serta mempunyai orientasi jangka panjang terhadap pembangunan desa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda mampu meningkatkan inovasi pembangunan, memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi pemerintahan desa, dan mempercepat proses transformasi sosial di tingkat lokal.² Oleh karena itu, rendahnya partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes bukan hanya menjadi persoalan representasi, tetapi juga berpotensi menghambat munculnya gagasan-gagasan baru dalam pembangunan desa.

Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat, khususnya partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui perspektif pembangunan partisipatif dan modal sosial. Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara struktur sosial, budaya lokal, dan proses pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Keramat Jaya,

² Barry Checkoway, "What Is Youth Participation?," *Children and Youth Services Review* 33, no. 2 (2011): 340–345.

pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemuda sehingga Musrenbangdes dapat berlangsung lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes merupakan isu yang penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan desa, efektivitas tata kelola pemerintahan desa, serta penguatan demokrasi lokal. Berangkat dari berbagai permasalahan, kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi empiris, serta masih terbatasnya kajian yang secara khusus membahas fenomena tersebut di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam **1. bagaimana bentuk partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi tersebut** **2. serta berbagai hambatan yang menyebabkan keterlibatan pemuda belum optimal.** Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memperkuat partisipasi pemuda sebagai aktor penting dalam pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan pemuda dalam musrenbangdes?

1.3 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.3.1 Identifikasi

1. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes. Meskipun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, partisipasi pemuda masih tergolong rendah.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pemuda terhadap fungsi Musrenbangdes.
3. Minimnya ruang representasi dan peran kelembagaan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Rendahnya dukungan dan fasilitasi dari pemerintah desa terhadap partisipasi pemuda.
5. Kurangnya literasi politik dan sosial di kalangan pemuda desa. Pemuda di Desa Keramat Jaya umumnya belum memiliki literasi yang memadai tentang tata kelola pemerintahan desa dan peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi lokal.
6. Belum optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda dalam proses pembangunan.



1.4 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah: (1) bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes; (2) faktor pengaruh baik internal (misalnya motivasi, pengetahuan, akses informasi) maupun eksternal (dukungan pemerintah desa, budaya lokal, anggaran, transparansi); dan (3) hambatan yang spesifik yang dihadapi pemuda di Desa Keramat Jaya. Alasan pentingnya meneliti hal ini adalah karena partisipasi pemuda bukan hanya soal inklusi sosial, tetapi juga soal efektivitas, legitimasi, dan keberlanjutan pembangunan desa. Keterlibatan pemuda dapat memastikan bahwa pembangunan desa merespons kebutuhan masa depan, bukan hanya kebutuhan sekarang, termasuk isu-isu seperti perubahan iklim, peluang ekonomi baru, dan modernisasi.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam partisipasi anak muda dalam proses pembangunan desa di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dan praktik demokrasi lokal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang membahas keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, terutama melalui forum formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa . Selama ini, sebagian besar penelitian tentang partisipasi masyarakat masih menempatkan pemuda hanya sebagai bagian dari kelompok masyarakat umum tanpa menyoroti secara spesifik dinamika sosial, politik, dan psikologis yang mempengaruhi keterlibatan mereka.

Dengan meneliti secara empiris fenomena partisipasi pemuda di Desa Keramat Jaya, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana faktor internal seperti kesadaran politik, kapasitas sosial, dan semangat voluntarisme berinteraksi dengan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah desa, peran lembaga kepemudaan, serta pola komunikasi pemerintahan. Hasilnya diharapkan dapat memperluas teori-teori tentang partisipasi politik, pembangunan partisipatif, dan pemberdayaan pemuda di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat argumentasi bahwa pemuda bukan sekadar objek pembangunan, melainkan aktor sosial yang memiliki potensi strategis dalam menggerakkan perubahan di lingkungan pedesaan.

1.6.2 Manfaat bagi dunia praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai yang penting dan langsung dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, organisasi kepemudaan, serta masyarakat Desa Keramat Jaya secara umum. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar empiris bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif terhadap keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda serta hambatan yang mereka hadapi, pemerintah desa dapat merancang strategi komunikasi dan program pemberdayaan yang lebih efektif, seperti pelatihan kepemimpinan muda, forum diskusi publik, dan mekanisme konsultasi yang melibatkan pemuda secara aktif dalam Musrenbangdes.

Bagi lembaga kepemudaan seperti Karang Taruna, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memperkuat kapasitas organisasi mereka dalam menjembatani aspirasi pemuda dengan kebijakan pembangunan desa. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam membangun kemitraan antara organisasi kepemudaan dan pemerintah desa, sehingga suara generasi muda dapat lebih terakomodasi dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan.

Di sisi lain, manfaat praktis juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Dengan meningkatnya partisipasi pemuda, proses Musrenbangdes dapat menjadi lebih representatif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lintas generasi. Secara jangka panjang, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam pembangunan desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti. Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran mengenai bentuk partisipasi, faktor pendorong dan penghambat partisipasi, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai partisipasi pemuda dalam forum Musrenbangdes di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Yara Mikasih, Fitrianti, dan Juaris pada tahun 2024 dengan judul *Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Gampong Genuren Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan pemuda dalam pembangunan gampong serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemuda masih tergolong rendah karena kurangnya kesadaran sosial, minimnya informasi mengenai program pembangunan, serta terbatasnya ruang yang diberikan kepada pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Secara analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pemuda sebagai kelompok produktif belum secara otomatis menjadikan mereka aktor utama dalam pembangunan desa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Namun, penelitian tersebut membahas pembangunan desa secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menelaah partisipasi pemuda dalam forum Musrenbangdes sebagai wadah perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini relevan karena memberikan

gambaran mengenai pola keterlibatan pemuda di wilayah Aceh yang memiliki karakteristik sosial budaya yang relatif serupa dengan lokasi penelitian.³

Penelitian kedua dilakukan oleh Hariyanto pada tahun 2022 dengan judul *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musrenbangdes di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan Musrenbangdes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat belum optimal karena sebagian besar masyarakat hanya hadir dalam forum musyawarah tanpa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi substantif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus terhadap Musrenbangdes sebagai instrumen pembangunan partisipatif. Perbedaannya, penelitian Hariyanto menitikberatkan pada masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji kelompok pemuda sebagai subjek penelitian. Relevansi penelitian ini terletak pada penggunaan indikator partisipasi yang dapat dijadikan acuan untuk menilai tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes.⁴

Penelitian ketiga dilakukan oleh Riza Ayu Nadhiro dan Ilmi Usrotin Choiriyah pada tahun 2024 dengan judul *Community Participation in Village Development Planning*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk mengkaji keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat relatif aktif dalam tahap identifikasi kebutuhan pembangunan, tetapi mengalami penurunan partisipasi pada tahap penyusunan program dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat sering

³ Yara Mikasih, Fitrianti, dan Juaris, "Youth Participation in the Development of Gampong Genuren, Bintang Subdistrict, Central Aceh Regency," *Jurnal Administrasi Negara* 30, no. 1 (2024): 48–70.

⁴ Hariyanto, "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Musrenbangdes di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 6 (2022).

kali hanya berlangsung pada tahap awal perencanaan dan belum berlanjut secara berkesinambungan pada seluruh tahapan pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Perbedaannya terletak pada fokus kelompok yang diteliti. Penelitian tersebut meneliti masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada pemuda sebagai kelompok strategis pembangunan desa. Relevansi penelitian ini terletak pada temuan mengenai pentingnya keberlanjutan partisipasi dalam seluruh tahapan pembangunan.⁵

Penelitian keempat dilakukan oleh Eka, Widia Astuti, dan Aguswan pada tahun 2021 dengan judul *Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menganalisis pengaruh kelembagaan desa terhadap efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan pemerintah desa, transparansi informasi, serta kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola forum musyawarah. Secara kritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tidak selalu disebabkan oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung partisipasi publik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji partisipasi dalam Musrenbangdes. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian tersebut lebih menekankan aspek kelembagaan, sedangkan penelitian ini lebih berorientasi pada perilaku partisipatif pemuda. Penelitian ini relevan karena dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana dukungan pemerintah desa memengaruhi partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes.⁶

⁵ Riza Ayu Nadhiro dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Community Participation in Village Development Planning," *Indonesian Journal of Public Policy Review* 2024.

⁶ Eka, Widia Astuti, dan Aguswan, "Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau," 2021.

Penelitian kelima dilakukan oleh Chaidir Ali pada tahun 2023 dengan judul *Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Tingkat Desa di Kota Banda Aceh*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif dengan tujuan untuk menganalisis tingkat keterlibatan perempuan dalam forum Musrenbang desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya yang menyebabkan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan belum optimal. Partisipasi yang terjadi sebagian besar masih bersifat simbolik dan belum mencapai tingkat pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pembangunan desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kajian mengenai kelompok sosial yang memiliki keterbatasan representasi dalam forum pembangunan desa. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, yaitu perempuan dan pemuda. Relevansi penelitian ini adalah memberikan perspektif mengenai bagaimana faktor budaya dan struktur kekuasaan lokal dapat memengaruhi kualitas partisipasi kelompok tertentu dalam Musrenbang⁷.

Penelitian keenam dilakukan oleh Hesti Geovany, Rachmawati, dan Sampurna pada tahun 2024 dengan judul *Community Participation in the Development Plan of Mande Village, Cianjur Regency*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi program. Akan tetapi, tingkat partisipasi berbeda pada setiap tahapan pembangunan sehingga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial maupun kelembagaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas partisipasi dalam pembangunan desa. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang tidak secara khusus mengkaji partisipasi pemuda maupun Musrenbangdes.

⁷ Chaidir Ali, "Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Tingkat Desa Kota Banda Aceh," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 9, no. 1 (2023): 53–82.

Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran mengenai variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.⁸

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Partisipasi

Istilah partisipasi dalam kajian sosial pada dasarnya merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu proses, kegiatan, atau keputusan yang memengaruhi mereka. Sebagai contoh, definisi dari platform hak sosial menyebutkan bahwa partisipasi adalah “keterlibatan efektif pemangku kepentingan dalam seluruh tahap proses pengambilan keputusan tentang program jaminan sosial, mulai dari desain kebijakan, pelaksanaan hingga monitoring.

Teori partisipasi Keith Davis sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat maupun partisipasi pemuda dalam pembangunan desa karena teori ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurut Keith Davis, partisipasi yang efektif akan menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*), rasa tanggung jawab, dan komitmen masyarakat terhadap program atau kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan tersebut.⁹

Partisipasi pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa terwujud dalam beragam bentuk seperti kehadiran fisik dalam musyawarah, penyampaian aspirasi lisan atau tertulis, pengajuan usulan prioritas, pembentukan kelompok kerja (pokja) berbasis isu, serta keterlibatan dalam proses penyusunan, pemungutan suara atau verifikasi usulan. Bentuk-bentuk ini tidak hanya berbeda secara teknis tetapi juga berbeda dalam dimensi kekuasaan siapa yang menentukan agenda, siapa yang memiliki akses informasi, dan siapa yang

⁸ Hesti Geovany, D., I. Rachmawati, dan R. H. Sampurna, “Community Participation in the Development Plan of Mande Village, Mande District, Cianjur Regency,” *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies* 1, no. 5 (2024).

⁹ Keith Davis, *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1981, hlm. 180.

dapat mengikat keputusan administratif. Konsepsi ini penting karena efektivitas Musrenbang bukan sekadar jumlah orang yang hadir, melainkan sejauh mana partisipasi tersebut berujung pada pengaruh nyata terhadap keputusan perencanaan dan alokasi anggaran.

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat mencakup beberapa dimensi kunci yang tak bisa diabaikan: pertama, dimensi gagasan atau Ide yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam memberikan pemikiran, aspirasi dan usulan terhadap arah pembangunan. Kedua, dimensi tenaga atau material meliputi kontribusi fisik, keahlian, atau dana oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, dimensi pengambilan keputusan dan pengawasan masyarakat bukan sekadar “objek” pembangunan, tetapi harus juga menjadi subjek yang turut menentukan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengawasi proses pembangunan agar tercipta rasa memiliki, efektivitas, dan keberlanjutan program.¹⁰

2.2.2 Teori Partisipasi Pemuda

Menurut Hart, partisipasi anak berakar pada hak asasi manusia, terutama yang diatur dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1989, khususnya Pasal 12 yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang menyangkut dirinya dan pendapat itu harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya.

Hart mendefinisikan partisipasi anak sebagai proses di mana anak-anak berbagi pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka dan kehidupan masyarakat tempat mereka tinggal. Artinya, partisipasi bukan hanya tentang mendengar pendapat anak, tetapi juga tentang memberi mereka ruang dan kekuasaan proporsional untuk memengaruhi hasil keputusan.

Mempertegas aplikasi khusus pada kelompok muda, Roger Hart mengadaptasi konsep tangga partisipasi ke ranah anak dan pemuda melalui esai “*Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship*”. Hart menyajikan analisis yang menekankan bahwa anak dan remaja rentan terhadap bentuk

¹⁰ Bangda Kemendagri. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

partisipasi yang bersifat simbolik karena faktor relasi kuasa antar-generasi dan norma budaya yang menempatkan orang dewasa sebagai satu-satunya pemegang otoritas. Adaptasi Hart relevan untuk penelitian ini karena Musrenbangdes desa seringkali adalah ruang sosio-kultural di mana norma penghormatan usia dan hierarki lokal dapat menekan inisiatif muda. Dengan menggunakan kerangka Hart, penelitian ini akan menilai tidak hanya apakah pemuda hadir dalam Musrenbangdes, tetapi juga pada level mana mereka terlibat (manipulasi, tokenisme, konsultatif, kolaboratif, atau pengendalian bersama). Kerangka ini sangat berguna untuk merumuskan indikator pengukuran partisipasi pemuda yang sensitif terhadap nuansa generasional dan budaya lokal.¹¹

Dari perspektif teoretis, model Hart sangat tepat digunakan dalam penelitian tentang partisipasi pemuda di Musrenbangdes karena ia memberikan alat ukur yang sistematis untuk menilai kedalaman dan kualitas partisipasi, bukan hanya keberadaan formal. Model ini memungkinkan peneliti mengkategorikan realitas empiris ke dalam tahapan partisipasi tertentu, lalu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tersebut, seperti dukungan pemerintah desa, kapasitas organisasi pemuda, maupun budaya politik lokal. Dengan demikian, teori ini membantu menghubungkan antara partisipasi sebagai konsep normatif dan partisipasi sebagai praktik sosial-politik di tingkat desa.¹²

2.2.3 Teori Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Sherry Arnstein, partisipasi masyarakat dapat diklasifikasikan dalam delapan tingkatan yang menggambarkan derajat hubungan masyarakat terhadap pengambilan keputusan publik, mulai dari yang paling rendah yakni manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penentruman (placation) hingga yang paling tinggi yaitu kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kontrol wargaan (citizen control). Dalam konteks pembangunan, tingkatan ini menunjukkan sejauh mana masyarakat bukan hanya dilibatkan secara simbolis tetapi benar-benar memiliki ruang pengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan

¹¹ Hart, R. A. (1992). *Children's participation: From tokenism to citizenship*. Florence: UNICEF International Child Development Centre.

¹²Ibid.

pengawasan program. Dengan demikian, upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan bergantung pada bagaimana proses partisipasi masyarakat bergerak dari level “tokenism” menuju level “citizen power”.¹³

Forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) menempati posisi sentral dalam kerangka partisipasi warga (citizen participation), karena melalui mekanisme ini masyarakat desa memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, berdialog dengan pemerintah desa dan lembaga desa, serta ikut berkontribusi dalam penetapan rencana kerja pembangunan desa (RKP-Desa). Misalnya, dalam penelitian di Desa Mande ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di Musrenbangdes mencakup dimensi pengambilan keputusan, perencanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi, meskipun tingkat kehadiran masih rendah. Dengan kata lain, Musrenbangdes idealnya mengubah warga dari sekadar penerima kebijakan menjadi subjek yang aktif dalam proses pembangunan, sekaligus meningkatkan legimitas, transparansi, dan efektivitas pembangunan desa melalui mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis.¹⁴

Dalam kajian partisipasi masyarakat, model seperti tangga partisipasi Sherry R. Arnstein menunjukkan perbedaan antara level formal (misalnya melalui konstitusi atau regulasi yang mensyaratkan keterlibatan warga), level kemitraan (partnership) antara warga dan pembuat kebijakan, serta level kekuasaan warga (citizen power) yang memberi kontrol nyata kepada komunitas. Pada level formal, warga mungkin hanya diberikan hak untuk diinformasikan atau dikonsultasikan, tetapi belum memiliki pengaruh keputusan yang substantif (tokenism). Kemudian, pada level kemitraan terjadi redistribusi kekuasaan melalui negosiasi antara warga dan lembaga pemerintahan, sehingga warga mampu ikut merancang dan melaksanakan program bersama pemerintah. Terakhir, pada level kekuasaan warga yang mencakup “delegated power” dan “citizen control” komunitas

¹³ Sherry R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224.

¹⁴ Hesti Geovany, D., Rachmawati, I., & Sampurna, R. H., *Community Participation in the Development Plan of Mande Village, Mande District, Cianjur Regency, LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 1(5), (2024)

memiliki wewenang untuk membuat keputusan kebijakan ataupun mengelola program secara otonom, menjadikan warga bukan hanya partisipan melainkan pemegang kendali dalam pembangunan . Dengan demikian, kesenjangan antara ketiga level ini memberi gambaran bahwa hanya melalui pergeseran dari formalitas ke kemitraan hingga penguasaan warga, partisipasi masyarakat dapat menjadi bermakna dan berdampak.¹⁵

Untuk memahami mengapa tingkat partisipasi berbeda antar komunitas, kajian modal sosial (*social capital*) memberi kerangka penjelasan yang komplementer. Robert Putnam (1995), mengemukakan bahwa jaringan sosial, norma saling percaya, dan asosiasi sipil membentuk modal sosial yang meningkatkan kemampuan komunitas untuk berkolaborasi dan beraksi kolektif. Ketika modal sosial tinggi misalnya lewat organisasi pemuda aktif, jaringan sekolah, atau masjid kemampuan pemuda untuk mengorganisir usulan, mendapatkan perhatian aparat, dan memantau tindak lanjut perencanaan menjadi lebih besar. Sebaliknya, melemahnya modal sosial cenderung memunculkan partisipasi pasif dan apatisme.¹⁶

Modal sosial mencakup tiga komponen utama kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*network*), dan norma-norma sosial (*norms*) yang bersama-sama membentuk kerangka dinamika sosial dalam komunitas. Kepercayaan merupakan elemen dasar yang memungkinkan individu untuk bergantung satu sama lain, mengurangi risiko kolaborasi dan memfasilitasi kerjasama secara berkelanjutan. Jaringan sosial merujuk pada hubungan struktural antara individu dan kelompok yang memungkinkan aliran informasi, sumber daya, dan dukungan antar anggota komunitas.¹⁷ Sedangkan norma-norma sosial adalah aturan atau ekspektasi kolektif yang mengarahkan perilaku anggota masyarakat dan memungkinkan terjadinya aksi kolektif yang lebih mudah dan efisien. Bila ketiga komponen ini berfungsi secara harmonis, modal sosial yang kuat mendorong terjadinya

¹⁵ Ibid No 12

¹⁶ Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, 6(1), 65–78.

¹⁷ Harto, S. P. (2019). Identifikasi modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(1).

koordinasi masyarakat, meningkatkan kapasitas adaptasi sosial, dan memperkuat dinamika sosial yang produktif dalam pembangunan komunitas.¹⁸

Dalam praktik partisipasi masyarakat, norma senioritas yakni budaya menghargai usia atau pengalaman yang lebih tua sebagai pemegang protagonisme dalam forum dialog seringkali menghambat keterlibatan pemuda. Sebagai contoh di Indonesia, sebuah kajian menyebut bahwa *“seniority is the largest external barrier to youth taking further roles in society”* karena generasi tua masih dominan dalam pengambilan keputusan lokal dan ruang partisipasi formal, sehingga pemuda merasa posisinya hanya sebagai objek atau penerima kebijakan, bukan sebagai subjek aktif. Akibatnya, meskipun pemuda memiliki potensi ide dan energi, mereka sulit memasuki forum-pertemuan pembangunan atau musrenbang yang dikuasai oleh struktur senioritas, mengurangi efektivitas dan keberlanjutan dukungan dari generasi muda terhadap proses pembangunan.¹⁹

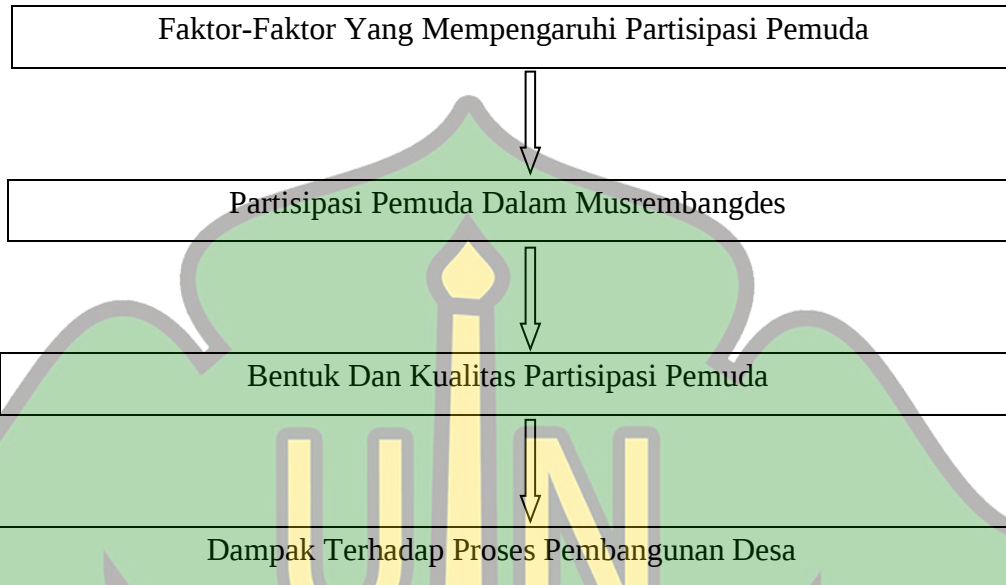
Kerangka teori-teori ini mendapat dukungan normatif dari regulasi nasional: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara eksplisit mewajibkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan pemberdayaan masyarakat. UU Desa memberi legitimasi institusional bagi praktik Musrenbangdes sebagai mekanisme perencanaan partisipatif di tingkat desa; namun sejumlah studi Indonesia (mis. penelitian mengenai praktik Musrenbangdes) menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dan praktik lapangan karena keterbatasan kapasitas, dinamika elite lokal, atau kelembagaan desa yang formal tetapi tidak fungsional. Oleh karena itu, landasan hukum mempertegas bahwa jika partisipasi pemuda tidak optimal di Keramat Jaya, masalahnya bukan semata-mata “kecenderungan budaya” tetapi juga implementasi kebijakan yang perlu dievaluasi dan direkomendasikan perbaikannya.²⁰

¹⁸ International Journal of Education and Social Science Research, *Social capital has three important dimensions in its application, namely trust, social networks, and norms*, International Journal of Education and Social Science Research, 2(3), (2019)

¹⁹ MADANI Indonesia, *Annex 21: Youth in Civil Society Assessment* (2023), hlm. 26.

²⁰ Regulasi” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

2.3 Kerangka Berpikir



Melalui kerangka pikir ini, Penelitian di arahkan untuk menganalisis bagaimana pemuda terjadi, Apa faktor yang mendorong dan menghambatnya, Serta bagaimana kualitas keterlibatan pemuda dapat di tingkatkan dalam proses musrembangdes di Desa Keramat Jaya,Kecamatan Bandar,Kabupaten Bener Meriah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian utama. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran numerik atau generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan interaksi sosial pemuda dalam konteks Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya. Dengan metode ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana pemuda merasakan, memahami, dan berperan dalam forum Musrenbangdes termasuk hambatan struktural, motivasi, dan dinamika pembentukan usulan serta hubungan pemuda-desa yang bersifat sosial dan budaya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kasus. Pendekatan studi kasus cocok karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu kasus spesifik, yaitu Desa Keramat Jaya di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah alasan mendasari pemilihan studi kasus: pertanyaan penelitian yang diarahkan "bagaimana" dan "mengapa" tentang partisipasi pemuda; konteks yang nyata dan tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh peneliti; dan kebutuhan akan gambaran mendalam mengenai interaksi sosial, budaya lokal, regulasi, dan kelembagaan desa. Literasi metodologis memperlihatkan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh data yang holistik dan kontekstual dari kehidupan nyata, di mana aspek-aspek seperti norma adat, hierarki sosial, peran pemuda, dan praktik pemerintahan desa secara nyata bertemu dan berinteraksi. Studi kasus juga mendukung penggunaan triangulasi sumber data dan metode (observasi, dokumentasi, wawancara, kepustakaan) agar hasil penelitian punya kedalaman dan kredibilitas.²¹

²¹ Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). "Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 45305-45314.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keramat Jaya, yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Desa Keramat Jaya termasuk dalam wilayah administratif Gampong di Aceh, dengan kode wilayah Kemendagri 11.17.04.2012 dan kode pos 24582. Secara geografis, Keramat Jaya berada dalam kecamatan Bandar yang merupakan salah satu dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bener Meriah.

Desa Keramat Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi lokasi yang ideal untuk mengamati fenomena partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes dengan cukup kompleksitas (interaksi struktural, budaya, regulasi lokal) dan cukup aksesibilitas untuk penelitian lapangan. Penelitian di desa ini diharapkan mampu menggambarkan gambaran nyata tentang bagaimana teori partisipasi, modal sosial, komunikasi deliberatif, dan pemberdayaan berinteraksi di konteks Aceh pada level desa.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan sifat deskriptif sangat sesuai dengan topik “Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya”, karena memungkinkan analisis mendalam atas fenomena lokal, konteks budaya atau kelembagaan, pengalaman pemuda, dan interaksi dinamis antara teori dan praktik partisipasi.

3.4 Informan Penelitian

3.4.1 Tabel Informan Penelitian

No.	Kategori Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1	Tokoh Pemuda / Karang Taruna	2 Orang	Pemuda aktif yang terlibat dalam kegiatan desa
2	Perangkat Desa	2 Orang	Kepala desa dan sekretaris desa

3	Tokoh Masyarakat	1 Orang	Orang yang berpengaruh dan memahami dinamika desa
---	------------------	---------	---

3.5 Metode Dan Jenis Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam proses penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik dari pengumpulan data dalam penulisan ini secara kualitatif yang dimana penulis mewawancarai informan secara komprehensif, dimana penulis sebagai peneliti melakukan observasi di lingkungan masyarakat Lesten selama masa penelitian berlangsung. Setelah mendapatkan data yang sudah terpenuhi dari informan selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk bagan atau uraian agar dapat dipahami oleh pembaca.

3.5.1 Melalui Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dalam penelitian, karena melibatkan data, wawancara merupakan elemen penting dari proses penelitian. Wawancara sebagai metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari informan dengan cara bertanya secara tatap muka (face to face) dan melalui dalam jaringan (WhatsApp/Email/Google Meet/Zoom). Peneliti melakukan wawancara langsung, wawancara langsung dilakukan oleh peneliti secara tatap muka, bertemu langsung dengan informan yang berkepentingan.

3.5.2 Melalui Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang dapat berupa publikasi dalam bentuk teks, gambar, dan video. Pendokumentasian dalam penelitian dianggap sangat penting oleh peneliti sehingga dapat mendukung sumber dalam penulisan ini.

3.5.3 Melalui Kepustakaan

Dalam penulisan ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yang dimana bersifat terdahulu baik itu berupa jurnal, skripsi, dokumentasi foto atau video, buku dokumen hukum dan sebagainya. Untuk dapat dinilai sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan skripsi maka diperlukan penggalan data agar data yang didapat dapat teruji secara akademis.

3.5.4 Melalui Observasi

Observasi digunakan untuk memahami fenomena secara langsung, menggambarkan kejadian sebagaimana adanya, serta menghindari data yang terlalu subjektif. Teknik ini cocok untuk mengamati interaksi sosial, kebiasaan, aktivitas kelompok, atau perilaku individu dalam lingkungan alaminya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara geografis, Kabupaten Bener Meriah terletak di wilayah dataran tinggi Gayo dengan luas wilayah sekitar 1.941,61 km². Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah di sebelah selatan, Kabupaten Bireuen di sebelah utara, Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat. Secara administratif, Kabupaten Bener Meriah terdiri atas 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandar, Bukit, Wih Pesam, Timang Gajah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Mesidah, Gajah Putih, dan Bener Kelipah. Ibu kota Kabupaten Bener Meriah berada di Simpang Tiga Redelong yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kabupaten Bener Meriah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi Arabika Gayo yang memiliki kualitas unggul dan telah dikenal hingga pasar internasional. Selain sektor perkebunan kopi, masyarakat juga menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa. Kondisi geografis yang berada pada dataran tinggi dengan suhu udara yang relatif sejuk menjadikan sektor pertanian dan perkebunan berkembang cukup pesat di daerah ini.²²

Dari aspek demografis, penduduk Kabupaten Bener Meriah didominasi oleh suku Gayo yang memiliki karakteristik budaya yang kuat, terutama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan sistem musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung (desa).

²² Aceh, *Bener Meriah Dalam Angka 2025*, diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk cukup besar serta aktivitas pembangunan desa yang terus berkembang. Oleh karena itu, wilayah ini dinilai relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), karena dapat memberikan gambaran mengenai keterlibatan generasi muda dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Desa Keramat Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah, Desa Keramat Jaya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi instrumen penting untuk menjamin keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam menentukan arah pembangunan desa.

Secara sosiologis, pemuda di Desa Keramat Jaya memiliki posisi strategis sebagai kelompok masyarakat produktif yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa. Keberadaan pemuda tidak hanya dipahami sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat desa. Dalam konteks ini, partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes menjadi indikator penting bagi terwujudnya demokrasi partisipatoris di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya secara formal telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa mengundang unsur masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok perempuan, serta perwakilan pemuda untuk menghadiri forum perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi, dalam praktiknya tingkat

keterlibatan pemuda masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek struktural, kultural, maupun normatif.

Penelitian ini memfokuskan analisis pada dua aspek utama, yaitu bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris normatif yang dikaitkan dengan teori partisipasi masyarakat dan teori pembangunan partisipatif.



Gambar 4.1 Peta Desa Keramat Jaya Kabupaten Bener Meriah

Demografi penduduk Kampung Keramat Jaya Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Secara Umum Tahun 2026

Data			Jumlah
Kepala Keluarga			231
Penduduk			768
Dusun	Sara Ine	Musara	2

		pakat	
--	--	-------	--

Ditinjau dari segi infrastrukturnya, Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah:

Tabel 4.2 Infrastruktur Fasilitas Desa Keramat Jaya Tahun 2026

No	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	1
2	Meunasah	2
3	Sekolah	2
4	Lapangan FUTSAL/VOLLY BALL	2
5	Gedung Serbaguna	1
6	Polindes	1
Total		9

A. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Perkembangan suatu wilayah sangat bergantung pada pertumbuhan dan perubahan jumlah penduduk, baik dari segi jumlah maupun kualitas individu. Oleh karena itu, penduduk memegang peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah. Desa Keramat Jaya berpenduduk 768 jiwa yang terdiri dari 231 Kepala Keluarga.

Desa Keramat Jaya mempunyai hasil Sumber Daya Alam di bidang perkebunan, pertanian dan peternakan yang dapat menjadi sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua sektor tersebut mempunyai potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan dan perlu dibenahi. Diperlukan pula penyuluhan-penyuluhan dan pelatihan di bidang yang digeluti masing masing masyarakat Desa. Sumber daya pertanian yang terdapat di Desa Keramat Jaya di antaranya, kopi dan sayur-sayuran. Banyak masyarakat Desa Keramat Jaya yang bermata pencaharian sebagai petani kopi dan sayur-sayuran. Desa Keramat Jaya

merupakan salah satu lokasi investasi jangka panjang yang menjanjikan di Indonesia.

B. Potensi dan Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa

Pemuda merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki posisi strategis dalam proses pembangunan desa. Dalam berbagai literatur pembangunan, pemuda dipandang sebagai agen perubahan (*agent of change*), agen pembangunan (*agent of development*), dan agen kontrol sosial (*agent of social control*). Posisi tersebut menjadikan pemuda tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Di Desa Keramat Jaya, keberadaan pemuda menjadi salah satu potensi sumber daya manusia yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa. Sebagai kelompok usia produktif, pemuda memiliki energi, kreativitas, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta semangat untuk melakukan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Potensi tersebut merupakan modal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan desa, terutama pada era digital yang menuntut adanya kemampuan berpikir kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai sektor pembangunan.

Pemuda memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan desa, pemuda dapat berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan kelompok usia muda. Melalui keterlibatan dalam organisasi kepemudaan maupun forum musyawarah desa, pemuda dapat memberikan gagasan dan masukan yang konstruktif bagi penyusunan program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemuda juga memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat. Keikutsertaan pemuda dalam kegiatan gotong royong, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, dan berbagai aktivitas sosial

lainnya menunjukkan bahwa pemuda mampu menjadi motor penggerak dalam membangun solidaritas sosial di lingkungan masyarakat. Keberadaan pemuda yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dapat memperkuat hubungan antarwarga serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam bidang ekonomi, pemuda juga memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan desa. Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, pemuda memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai usaha kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Pemanfaatan media digital untuk pemasaran produk pertanian, pengembangan usaha mikro, serta promosi potensi desa merupakan beberapa contoh kontribusi yang dapat dilakukan oleh pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

Di samping berbagai potensi yang dimiliki, pemuda juga menghadapi sejumlah tantangan dalam keterlibatannya pada pembangunan desa. Salah satu tantangan yang sering ditemukan adalah masih rendahnya keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam beberapa kasus, pemuda lebih banyak dilibatkan pada tahap pelaksanaan kegiatan dibandingkan pada tahap perencanaan. Akibatnya, berbagai aspirasi dan kebutuhan pemuda belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan desa.

C. Kondisi Sosial dan Potensi Kepemudaan Desa Keramat Jaya

Sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Desa Keramat Jaya memiliki karakteristik sosial masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung proses pembangunan desa. Dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, masyarakat Desa Keramat Jaya masih menunjukkan tingkat solidaritas yang cukup tinggi, baik dalam kegiatan keagamaan, kegiatan adat, maupun kegiatan sosial lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa hubungan

sosial antarwarga masih terjalin dengan baik dan menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa.

Keberadaan modal sosial yang kuat dalam masyarakat merupakan faktor yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang partisipatif. Menurut konsep pembangunan partisipatif, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, kondisi sosial masyarakat Desa Keramat Jaya yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan menjadi potensi yang dapat mendukung keterlibatan masyarakat, termasuk pemuda, dalam forum Musrenbangdes.

Selain memiliki modal sosial yang kuat, Desa Keramat Jaya juga memiliki jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar. Kelompok usia produktif tersebut sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan kopi yang menjadi komoditas unggulan masyarakat. Keberadaan kelompok usia produktif tersebut merupakan aset pembangunan yang sangat penting karena dapat menjadi penggerak berbagai program pembangunan desa. Dalam konteks ini, pemuda memiliki posisi strategis karena berada pada fase usia yang memiliki kemampuan fisik, kreativitas, dan semangat inovasi yang relatif tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.

Pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerus pembangunan desa di masa depan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembangunan sejak saat ini. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa menjadi penting karena kelompok ini memiliki perspektif yang berbeda terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemuda umumnya lebih dekat dengan perkembangan teknologi, informasi, dan perubahan sosial sehingga mampu memberikan gagasan-gagasan baru yang dapat mendukung kemajuan desa.

D. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Keramat Jaya

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat dapat memengaruhi pola pikir, kemampuan dalam menerima informasi, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, kondisi pendidikan masyarakat menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat potensi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

Masyarakat Desa Keramat Jaya memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Hal ini terlihat dari adanya upaya masyarakat untuk memberikan pendidikan formal kepada anak-anak mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masa depan individu maupun kemajuan desa secara keseluruhan.

Keberadaan fasilitas pendidikan di Desa Keramat Jaya turut mendukung proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data desa, terdapat fasilitas pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dasar. Selain itu, masyarakat juga memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang berada di wilayah sekitar Kecamatan Bandar sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, tingkat pendidikan masyarakat masih menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian masyarakat telah menempuh pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, sementara sebagian lainnya masih berada pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut secara tidak langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami berbagai program pembangunan serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Dalam konteks pembangunan desa, pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan tingkat partisipasi masyarakat. Masyarakat yang memiliki tingkat

pendidikan lebih tinggi umumnya cenderung lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta terlibat dalam berbagai forum musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sering kali menunjukkan partisipasi yang terbatas karena kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pembangunan maupun hak-hak mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Bagi kalangan pemuda, pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas partisipasi dalam pembangunan desa. Pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik umumnya lebih mudah memahami berbagai isu pembangunan, mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk menyampaikan gagasan secara lebih sistematis dan rasional. Oleh karena itu, tingkat pendidikan pemuda dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

4.2 Hasil Temuan Penelitian

4.2.1 Bentuk Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa pada dasarnya merupakan amanat konstitusional yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pemerintahan desa, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat secara lebih spesifik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat desa, termasuk

pemuda, memiliki legitimasi hukum untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.²³

Selain itu, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Desa menegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Norma ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur bahwa Musrenbangdes dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat desa.

Secara teleologis, pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang demokratis, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes tidak boleh dipahami hanya sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Dusun Bapak Andaria (51 Tahun) sebagai berikut:

“Menurut saya musrenbang ni ken munyusun rencana pembangunen si sesuai urum kebutuhan masyarakat,ken muningketen partisipasi warga,serta muciptanen pembangunen si lebih tepat ku sasaran,transparan dan merata” (Menurut saya, tujuan diadakannya Musrenbangdes adalah untuk menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta menciptakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan merata).²⁴

Apabila ditafsirkan secara sistematis, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Desa berkaitan erat dengan prinsip good governance yang menekankan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan. Dengan demikian, pelibatan pemuda dalam

²³ Regulasi,”Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁴ “Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Keramat Jaya Bapak Andaria,pada Tanggal 8 Mei 2026”,.

Musrenbangdes bukan hanya kewajiban moral pemerintah desa, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat dalam sistem pemerintahan desa.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan normatif tersebut masih menyisakan kekaburan norma terkait bentuk keterlibatan pemuda secara spesifik. Peraturan perundang-undangan hanya menyebut unsur masyarakat secara umum tanpa memberikan pengaturan lebih rinci mengenai representasi pemuda dalam forum Musrenbangdes. Kekaburan norma ini berimplikasi pada tidak adanya standar minimal keterwakilan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Ketiadaan pengaturan yang lebih konkret menyebabkan pelibatan pemuda sangat bergantung pada kebijakan subjektif pemerintah desa. Dalam praktiknya, terdapat desa yang memberikan ruang luas bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi, namun terdapat pula desa yang hanya melibatkan pemuda secara simbolis demi memenuhi formalitas prosedural.

Dari perspektif teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein melalui konsep “Ladder of Citizen Participation”, partisipasi masyarakat memiliki tingkatan mulai dari manipulasi hingga citizen control. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi pemuda di Desa Keramat Jaya cenderung masih berada pada tingkat consultation dan placation, karena pemuda diberikan ruang untuk hadir dan menyampaikan pendapat, tetapi belum memiliki pengaruh dominan terhadap pengambilan keputusan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu partisipasi dalam kehadiran forum, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam perumusan usulan pembangunan, serta keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Partisipasi dalam bentuk kehadiran forum merupakan bentuk partisipasi paling mendasar. Pemuda di Desa Keramat Jaya umumnya hadir sebagai perwakilan organisasi kepemudaan, karang taruna, maupun kelompok masyarakat lainnya. Kehadiran tersebut menunjukkan adanya kesadaran awal mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses pembangunan desa.

Namun demikian, secara substantif kehadiran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi yang efektif. Dalam beberapa pelaksanaan Musrenbangdes, pemuda hanya berperan sebagai peserta pasif yang mendengarkan pemaparan pemerintah desa tanpa terlibat secara aktif dalam proses perumusan prioritas pembangunan.

Dari perspektif penafsiran gramatikal terhadap frasa “mengikutsertakan masyarakat” dalam Pasal 80 Undang-Undang Desa, partisipasi seharusnya dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan, bukan sekadar kehadiran fisik dalam forum musyawarah. Oleh karena itu, apabila pemuda hanya dihadirkan tanpa diberikan ruang pengambilan keputusan yang memadai, maka secara substantif tujuan partisipasi belum tercapai.

Bentuk partisipasi berikutnya adalah penyampaian aspirasi dan usulan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pemuda telah menyampaikan usulan terkait pembangunan sarana olahraga, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi pemuda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, tidak seluruh usulan tersebut diakomodasi dalam prioritas pembangunan desa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Pemuda Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Saudara Pitrada Mahesa (26 Tahun) selaku Pemuda yang aktif dalam mengikuti Musrenbangdes sebagai berikut:

“Saya pernah menyampaikan usulan, tetapi tidak sering. Usulan yang pernah saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, seperti perbaikan lapangan olahraga dan pelatihan untuk pemuda agar ada kegiatan yang lebih bermanfaat di desa. Usulan tersebut sempat ditanggapi oleh pihak desa dan dicatat dalam musyawarah, tetapi belum semuanya direalisasikan. Menurut saya, mungkin karena masih ada program lain yang dianggap lebih prioritas.”²⁵

²⁵ “Wawancara Dengan Tokoh Pemuda Desa Keramat Jaya Saudara Pitrada Mahesa, pada Tanggal 10 Mei 2026”.

Dalam beberapa kasus, usulan pemuda cenderung dianggap kurang prioritas dibanding pembangunan fisik seperti jalan desa atau fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya dominasi pendekatan pembangunan yang masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur dibanding pembangunan sumber daya manusia.

Padahal, secara teleologis tujuan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian, pengesampingan aspirasi pemuda terkait pemberdayaan dan pengembangan kapasitas manusia menunjukkan belum optimalnya implementasi tujuan hukum pembangunan desa.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Peneliti Dengan Ketua Umum Pemuda kampung Keramat Jaya Saudara Izkala Fajri (30 tahun) sebagai berikut:

“Menurut saya, partisipasi pemuda di Desa Keramat Jaya masih belum terlalu aktif. Ada beberapa pemuda yang memang ikut hadir dan memberikan usulan, tetapi sebagian besar hanya datang untuk mendengarkan, bahkan ada juga yang tidak ikut sama sekali. Banyak pemuda yang merasa kurang percaya diri atau menganggap Musrenbangdes lebih didominasi oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat.”²⁶

Selain itu, bentuk partisipasi pemuda juga terlihat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa pemuda memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan desa meskipun belum sepenuhnya terlibat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.

Menurut teori partisipasi Keith Davis, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui keterlibatan mental dan emosional dalam pencapaian tujuan

²⁶ “Wawancara dengan Ketua Umum Pemuda Kampung Keramat Jaya Izkala Fajri , pada Tanggal 8 Mei 2026”.

kelompok. Dalam konteks ini, pemuda di Desa Keramat Jaya secara sosial telah menunjukkan keterlibatan emosional terhadap pembangunan desa, namun secara struktural belum memperoleh posisi strategis dalam proses perencanaan pembangunan.

Selain bentuk partisipasi yang diwujudkan melalui kehadiran dalam forum, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan, partisipasi pemuda juga dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial jangka panjang bagi pembangunan desa. Pemuda merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas adaptasi tinggi terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda dalam Musrenbangdes tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan saat ini, tetapi juga menjadi sarana pembentukan kader-kader pembangunan desa di masa mendatang.

Dalam perspektif pembangunan partisipatif, pemuda tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program yang telah dirancang pemerintah desa, melainkan juga sebagai sumber ide, inovasi, dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemuda umumnya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang muncul akibat perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti kebutuhan peningkatan keterampilan digital, pengembangan usaha kreatif, penguatan organisasi kepemudaan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam Musrenbangdes menjadi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara lebih komprehensif.

Berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian, sebagian pemuda di Desa Keramat Jaya menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan desa melalui partisipasi dalam kegiatan gotong royong, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan berbagai program kepemudaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat modal sosial yang cukup kuat di kalangan pemuda. Akan tetapi, modal sosial tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Dengan kata lain, pemuda

lebih banyak berperan pada tahap implementasi dibandingkan tahap perencanaan dan penentuan kebijakan.

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi operasional dan partisipasi strategis. Partisipasi operasional tercermin dari keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sedangkan partisipasi strategis berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam menentukan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi pemuda di Desa Keramat Jaya masih lebih dominan pada aspek operasional dibandingkan aspek strategis.

4.2.2 Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes

Tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya dapat dianalisis berdasarkan intensitas keterlibatan, kemampuan mempengaruhi keputusan, serta keberlanjutan keterlibatan dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi pemuda masih tergolong sedang hingga rendah. Hal ini terlihat dari keterlibatan pemuda yang masih terbatas pada tahap konsultasi dan penyampaian aspirasi tanpa memiliki kewenangan menentukan keputusan akhir. Pemerintah desa tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Kemudian berikut hasil wawancara dari perangkat desa sekaligus menjadi bagian dari Tim 11 saat pelaksanaan musrenbangdes di Desa Keramat Jaya Bapak Dianto (47 Tahun):

“menurut saya,tingket keikutsertaan pemuda i desa ni dalam musrenbang i desa kite ni maseh ilenne tergolong sedang munuju turun ,saya munengonne jep ara kegiatan memang ara pemuda si hadir,tetapi gilen terlalu dele si hadir ike kite engon ari bewene jumlah pemuda te i kampung keramat jaya ni.”(Menurut saya, tingkat keikutsertaan pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya masih berada pada tingkat sedang menuju rendah. Sebagai perangkat desa dan bagian dari Tim 11 pelaksanaan Musrenbangdes, saya melihat bahwa setiap kegiatan memang ada pemuda yang hadir, tetapi jumlahnya belum terlalu banyak dibandingkan jumlah pemuda yang ada di desa. Hal ini disebabkan karena masih

kurangnya kesadaran pemuda terhadap pentingnya Musrenbangdes, ditambah sebagian pemuda lebih fokus pada pekerjaan atau kegiatan pribadi sehingga kurang tertarik mengikuti musyawarah desa.)²⁷

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan kelompok pemuda dalam forum Musrenbangdes. Secara normatif, forum musyawarah seharusnya menjadi ruang deliberatif yang menempatkan seluruh peserta dalam posisi setara. Akan tetapi, dalam praktiknya struktur sosial dan budaya lokal masih mempengaruhi distribusi pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif teori demokrasi partisipatoris, rendahnya pengaruh pemuda dalam pengambilan keputusan menunjukkan belum optimalnya demokratisasi di tingkat desa. Demokrasi desa seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai prosedur formal penyelenggaraan musyawarah, tetapi juga menjamin keterlibatan substantif seluruh kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat partisipasi pemuda juga dipengaruhi oleh minimnya pendidikan politik dan pemahaman hukum terkait hak partisipasi masyarakat desa. Banyak pemuda yang belum memahami bahwa partisipasi dalam Musrenbangdes merupakan hak konstitusional sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah desa.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila partisipasi masyarakat hanya bersifat formalitas, maka proses pengambilan keputusan berpotensi kehilangan legitimasi sosial.

Selain itu, terdapat inkonsistensi antara norma hukum yang menghendaki pembangunan partisipatif dengan praktik pelaksanaan Musrenbangdes yang masih bersifat elitis. Inkonsistensi tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa melemahnya kepastian hukum terhadap hak partisipasi masyarakat, khususnya kelompok pemuda.

²⁷ “Wawancara Dengan Perangkat Desa Sekaligus Menjadi Bagian Tim 11 Saat melakukan Musrenbangdes Bapak Dianto, Pada tanggal 8 Mei 2026.”

Secara preskriptif, diperlukan penguatan regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur keterwakilan pemuda dalam Musrenbangdes. Pemerintah desa juga perlu membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dengan memberikan ruang deliberatif yang lebih luas bagi pemuda.

Tingkat partisipasi pemuda tidak hanya dapat diukur dari jumlah kehadiran dalam forum Musrenbangdes, tetapi juga dapat dilihat dari kualitas keterlibatan mereka selama proses musyawarah berlangsung. Kualitas partisipasi mencakup keberanian menyampaikan pendapat, kemampuan memberikan argumentasi terhadap usulan yang diajukan, keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta kemampuan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah. Semakin besar pengaruh yang dimiliki pemuda dalam proses tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasinya.

Dalam konteks Desa Keramat Jaya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda masih berada pada posisi sebagai peserta yang mengikuti jalannya musyawarah tanpa terlibat secara aktif dalam proses perdebatan maupun perumusan prioritas pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ruang partisipasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemuda untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga menunjukkan perlunya upaya pemerintah desa untuk menciptakan suasana musyawarah yang lebih inklusif dan mendorong keterlibatan aktif generasi muda.

Apabila dianalisis menggunakan teori partisipasi Keith Davis, partisipasi yang ideal tidak hanya ditandai oleh keterlibatan fisik seseorang dalam suatu kegiatan, tetapi juga oleh keterlibatan mental dan emosional dalam mencapai tujuan bersama. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa keterlibatan emosional pemuda terhadap pembangunan desa sebenarnya cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya kepedulian terhadap berbagai permasalahan desa serta keinginan untuk melihat kemajuan desa di masa depan. Namun demikian, keterlibatan mental dalam bentuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan masih relatif terbatas.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi partisipasi dan aktualisasi partisipasi. Potensi partisipasi tercermin dari jumlah

pemuda yang cukup besar serta tingginya kepedulian terhadap pembangunan desa, sedangkan aktualisasi partisipasi terlihat dari rendahnya tingkat keterlibatan aktif dalam forum Musrenbangdes. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas pemuda agar lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.

4.3 Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Pemuda dalam Musrenbangdes

4.3.1 Faktor Pendorong Partisipasi Pemuda

Partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor pendorong pertama adalah adanya kesadaran sosial pemuda terhadap pentingnya pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pemuda memiliki kesadaran bahwa pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kesadaran tersebut mendorong pemuda untuk hadir dan menyampaikan aspirasi dalam forum Musrenbangdes.

Dalam perspektif teori civic engagement, keterlibatan masyarakat dalam urusan publik merupakan indikator berkembangnya kesadaran kewarganegaraan. Pemuda yang aktif dalam Musrenbangdes menunjukkan adanya orientasi kolektif terhadap kepentingan publik. Faktor pendorong berikutnya adalah keberadaan organisasi kepemudaan seperti karang taruna yang menjadi media konsolidasi aspirasi pemuda. Organisasi kepemudaan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemuda dan pemerintah desa.

Secara normatif, keberadaan organisasi masyarakat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, organisasi kepemudaan memiliki legitimasi konstitusional untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Selain itu, dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi pemuda. Pemerintah desa yang terbuka terhadap aspirasi

masyarakat cenderung mampu menciptakan iklim partisipasi yang lebih demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Keramat Jaya dalam beberapa kesempatan telah memberikan ruang bagi pemuda untuk menyampaikan pendapat dan usulan pembangunan. Hal ini menunjukkan adanya upaya implementasi asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait faktor pendorong Partisipasi Pemuda, Berikut hasil wawancara peneliti penjelasan dari Bapak Sabran Salah Satu Tokoh Masyarakat Desa Keramat Jaya:

“menurut saya,pemerintah Desa ni nge le berupaya mulibeten pemuda ni,minselle lagu mengundang karang taruna orom perwakilan pemuda ken musrenbangdes ni,tapi keterlibatan pakea perlu i tingkatan,nume sekedar enggeh, ike tapi nguk munosah ruang lebih kul ken pemuda untuk munyawahen ide dan munonong i was proses pembangunan kampung kite ni.(“Menurut saya, pemerintah desa sudah berupaya melibatkan pemuda, misalnya dengan mengundang karang taruna dan perwakilan pemuda dalam Musrenbangdes. Namun, keterlibatan tersebut masih perlu ditingkatkan, bukan hanya sebatas hadir, tetapi juga memberi ruang yang lebih besar bagi pemuda untuk menyampaikan ide dan ikut dalam proses perencanaan pembangunan desa”).²⁸

Namun demikian, dukungan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan afirmatif yang menjamin keterlibatan pemuda secara berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi pemuda masih bergantung pada pendekatan personal dan kondisi sosial tertentu.

²⁸ “Hasil wawancara Dengan Sekretaris Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Bapak Sabran,Pada Tanggal 9 Mei 2026”.

4.3.2 Faktor Penghambat Partisipasi Pemuda

Selain faktor pendorong, terdapat berbagai faktor yang menghambat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya. Faktor penghambat pertama adalah rendahnya pemahaman pemuda mengenai mekanisme Musrenbangdes dan hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Banyak pemuda yang belum memahami prosedur penyusunan usulan pembangunan maupun mekanisme pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan implementatif dalam pendidikan hukum dan pendidikan politik di tingkat desa. Secara normatif, negara memiliki kewajiban untuk menjamin partisipasi masyarakat melalui penyediaan akses informasi dan pendidikan publik.

Dalam perspektif asas good governance, keterbukaan informasi merupakan syarat utama bagi terciptanya partisipasi masyarakat yang efektif. Tanpa akses informasi yang memadai, partisipasi masyarakat cenderung bersifat semu.

Faktor penghambat berikutnya adalah budaya sosial yang masih menempatkan kelompok tertentu sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan desa. Dalam beberapa forum Musrenbangdes, tokoh masyarakat dan aparat desa memiliki pengaruh lebih besar dibanding kelompok pemuda.

Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural dalam pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat desa. Secara sosiologis, budaya paternalistik masih mempengaruhi pola hubungan antara generasi muda dan kelompok elit desa.

Dari perspektif teori kekuasaan Michel Foucault, relasi kekuasaan dalam masyarakat sering kali menentukan siapa yang memiliki legitimasi untuk berbicara dan menentukan kebijakan. Dalam konteks Musrenbangdes, dominasi elit desa menyebabkan aspirasi pemuda tidak selalu memperoleh perhatian yang proporsional.

Selain itu, faktor ekonomi dan pendidikan juga menjadi hambatan partisipasi pemuda. Sebagian pemuda lebih fokus pada pekerjaan dan aktivitas ekonomi sehingga kurang aktif mengikuti kegiatan Musrenbangdes.

Secara teleologis, tujuan pembangunan desa seharusnya menciptakan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh termasuk peningkatan kapasitas pemuda. Akan tetapi, minimnya program pemberdayaan pemuda menyebabkan keterlibatan mereka dalam pembangunan desa belum berkembang secara optimal.

Faktor lainnya adalah tidak adanya pengaturan teknis yang mewajibkan kuota keterwakilan pemuda dalam Musrenbangdes. Kekosongan hukum ini menyebabkan partisipasi pemuda bergantung pada kebijakan pemerintah desa masing-masing.

Berikut Hasil wawancara dari salah satu Pemuda Kampung Keramat Jaya saudara Reza Agung Kurniawan (28 Tahun) sebagai Berikut:

“Menurut saya, ada faktor budaya dan kebiasaan yang masih memengaruhi keterlibatan pemuda. Di masyarakat desa, biasanya keputusan atau pembahasan penting lebih didominasi oleh tokoh masyarakat dan orang yang lebih tua. Akibatnya, sebagian pemuda merasa sungkan atau kurang berani menyampaikan pendapat karena menghormati orang yang lebih senior.”²⁹

Dari perspektif kepastian hukum, ketiadaan pengaturan mengenai representasi pemuda menimbulkan ketidakseragaman implementasi partisipasi masyarakat antar desa. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan diskriminasi terhadap kelompok pemuda dalam proses pembangunan desa.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Analisis Temuan Berdasarkan Teori Partisipasi

Teori partisipasi merupakan landasan konseptual utama dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses perencanaan pembangunan desa tidak hanya diukur dari aspek kehadiran secara fisik, tetapi juga dari kualitas kontribusi yang diberikan selama proses pengambilan keputusan berlangsung. Dalam konteks Musyawarah

²⁹ “Hasil Wawancara dengan salah satu Pemuda Desa Keramat Jaya Saudara Reza Agung Kurniawan Pada tanggal 10 Mei 2026”

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memberikan pertimbangan terhadap berbagai alternatif kebijakan, serta ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hasil musyawarah. Oleh karena itu, analisis terhadap hasil penelitian tidak hanya diarahkan untuk mengetahui apakah pemuda hadir dalam forum Musrenbangdes, tetapi juga untuk menilai sejauh mana keterlibatan tersebut mencerminkan partisipasi yang substantif sebagaimana dijelaskan dalam teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Keramat Jaya telah melaksanakan Musrenbangdes sesuai mekanisme formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengundang berbagai unsur masyarakat, termasuk perwakilan pemuda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pemerintah desa telah berupaya memenuhi prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa kehadiran pemuda dalam forum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesempatan yang setara untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Sebagian besar pemuda hadir sebagai peserta, tetapi ruang untuk menyampaikan gagasan masih relatif terbatas sehingga keterlibatan mereka lebih banyak bersifat simbolik daripada substantif.

Apabila dianalisis menggunakan teori Keith Davis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konsep partisipasi belum sepenuhnya terpenuhi. Keith Davis mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, emosional, dan fisik seseorang dalam aktivitas kelompok yang mendorong individu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama serta bersedia memikul tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan. Definisi tersebut menegaskan bahwa partisipasi bukan sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan, melainkan adanya kesadaran untuk berpikir, mengemukakan pendapat, memengaruhi proses pengambilan keputusan, serta ikut bertanggung jawab terhadap implementasi keputusan tersebut.

Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, terlihat bahwa dimensi keterlibatan fisik telah terpenuhi karena pemuda diundang dan menghadiri Musrenbangdes. Namun demikian, dimensi keterlibatan mental dan emosional belum berkembang secara optimal. Sebagian pemuda masih menunjukkan sikap pasif ketika forum berlangsung. Mereka cenderung menunggu arahan dari perangkat desa atau tokoh masyarakat sebelum menyampaikan pendapat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemuda dalam forum belum sepenuhnya didorong oleh rasa memiliki terhadap proses pembangunan desa, tetapi masih dipengaruhi oleh budaya birokratis dan struktur sosial yang menempatkan kelompok usia muda sebagai pihak yang kurang dominan dalam proses musyawarah.

Dari perspektif teori Keith Davis, rendahnya keterlibatan mental tersebut menunjukkan bahwa kualitas partisipasi belum mencapai tingkat ideal. Partisipasi yang sesungguhnya baru akan terwujud apabila setiap peserta memiliki keberanian mengemukakan gagasan, terlibat dalam diskusi secara aktif, serta mampu memengaruhi arah keputusan yang diambil secara kolektif. Dengan demikian, persoalan utama dalam Musrenbangdes Desa Keramat Jaya bukan terletak pada absennya pemuda dari forum, melainkan pada belum optimalnya ruang deliberasi yang memungkinkan mereka berkontribusi secara bermakna.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa usulan yang disampaikan oleh pemuda tidak selalu menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan desa. Aspirasi pemuda memang diterima sebagai bagian dari proses musyawarah, tetapi dalam tahap penetapan prioritas sering kali usulan tersebut kalah oleh kepentingan yang dianggap lebih mendesak menurut pemerintah desa maupun tokoh masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi yang berlangsung masih berorientasi pada konsultasi, bukan pada pembagian kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

4.4.2 Analisis Temuan Teori Partisipasi Pemuda

Apabila dianalisis menggunakan teori Tangga Partisipasi Anak dan Pemuda (*Ladder of Participation*) yang dikembangkan oleh Roger A. Hart (1992), kualitas partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya menunjukkan bahwa keterlibatan mereka belum sepenuhnya mencapai bentuk partisipasi yang ideal. Hart menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna tidak dapat diukur hanya dari kehadiran pemuda dalam suatu forum atau kegiatan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana mereka memiliki kesempatan untuk memahami persoalan, mengemukakan pendapat, memengaruhi keputusan, serta berbagi tanggung jawab dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, ukuran utama partisipasi bukanlah banyaknya pemuda yang hadir dalam Musrenbangdes, melainkan sejauh mana suara, gagasan, dan kepentingan mereka benar-benar menjadi bagian dari keputusan yang dihasilkan melalui forum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Keramat Jaya telah memberikan ruang formal kepada pemuda untuk menghadiri Musrenbangdes sebagai bagian dari unsur masyarakat yang memiliki hak menyampaikan aspirasi. Dari sisi prosedural, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih jauh berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ruang partisipasi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi ruang dialog yang memungkinkan pemuda berperan sebagai mitra sejajar dalam proses perumusan kebijakan pembangunan. Sebagian besar pemuda hadir sebagai peserta forum, namun peran mereka lebih banyak terbatas pada mendengarkan jalannya pembahasan, memberikan usulan apabila diminta, kemudian menerima keputusan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh lebih besar dalam struktur pemerintahan desa.

Menurut Hart, bentuk partisipasi seperti ini menunjukkan bahwa pemuda belum memperoleh posisi sebagai subjek pembangunan, tetapi masih berada pada posisi sebagai kelompok yang dilibatkan dalam proses yang telah dirancang oleh orang dewasa. Dengan kata lain, pemuda diberikan kesempatan untuk

berpartisipasi, tetapi belum memperoleh ruang yang memadai untuk menentukan arah partisipasi tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa proses Musrenbangdes masih didominasi oleh pendekatan *adult-centered*, yaitu pola pengambilan keputusan yang bertumpu pada aktor-aktor dewasa sebagai penentu utama kebijakan, sedangkan pemuda lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap legitimasi bahwa proses pembangunan telah melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Dalam perspektif Hart, kondisi demikian tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai kegagalan partisipasi, karena pemuda tetap memperoleh akses untuk hadir dan berinteraksi dalam forum publik. Akan tetapi, kualitas partisipasi tersebut belum mencapai tingkat *shared decisions with adults* atau *youth-initiated, shared decisions with adults*, yaitu tingkat partisipasi yang memungkinkan pemuda bersama pemerintah desa merumuskan agenda, mendiskusikan alternatif kebijakan, serta mengambil keputusan secara kolaboratif. Hasil penelitian justru memperlihatkan bahwa proses penyusunan agenda pembangunan masih lebih banyak dipengaruhi oleh prioritas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh masyarakat. Akibatnya, aspirasi pemuda cenderung bersifat komplementer terhadap agenda yang telah dirumuskan sebelumnya, bukan menjadi bagian yang membentuk arah kebijakan sejak tahap awal.

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada rendahnya kesediaan pemuda untuk berpartisipasi, melainkan pada desain kelembagaan Musrenbangdes yang belum sepenuhnya membuka ruang bagi terjadinya pembagian peran secara setara. Dalam praktiknya, hubungan antara pemerintah desa dan pemuda masih menunjukkan karakter hubungan vertikal, di mana pemerintah desa berperan sebagai pihak yang menentukan ruang partisipasi, sedangkan pemuda menyesuaikan diri terhadap ruang yang telah disediakan. Pola hubungan seperti ini menyebabkan partisipasi bersifat reaktif. Pemuda baru menyampaikan aspirasi setelah forum dibuka atau setelah diminta memberikan pendapat, bukan terlibat sejak tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, hingga penentuan prioritas pembangunan.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian pemuda masih merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat di hadapan tokoh masyarakat maupun perangkat desa. Fenomena tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kapasitas individu, tetapi harus dianalisis sebagai konsekuensi dari budaya sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi penghormatan terhadap senioritas, hubungan antara generasi muda dan generasi yang lebih tua cenderung dibangun atas dasar penghormatan dan kepatuhan. Nilai budaya tersebut memiliki sisi positif karena menjaga harmoni sosial, namun pada saat yang sama dapat membatasi keberanian pemuda untuk mengemukakan pandangan yang berbeda dalam forum musyawarah. Akibatnya, banyak gagasan yang sebenarnya dimiliki oleh pemuda tidak tersampaikan secara optimal karena adanya pertimbangan etika, rasa sungkan, maupun kekhawatiran dianggap tidak menghormati pihak yang lebih tua.

Apabila ditinjau dari teori Hart, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan partisipasi tidak hanya berasal dari faktor kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kultural yang membentuk pola interaksi dalam masyarakat. Hart menegaskan bahwa partisipasi yang berkualitas memerlukan lingkungan yang mampu memberikan rasa aman, kepercayaan, serta penghargaan terhadap setiap pendapat tanpa memandang usia maupun status sosial. Dengan demikian, keberhasilan pelibatan pemuda tidak cukup dilakukan melalui pemberian undangan resmi untuk menghadiri Musrenbangdes, tetapi juga harus diikuti oleh penciptaan suasana musyawarah yang inklusif, egaliter, dan bebas dari dominasi kelompok tertentu.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi pemuda justru lebih menonjol pada tahap implementasi pembangunan. Pemuda aktif dalam kegiatan gotong royong, pembangunan fasilitas desa, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan olahraga, maupun berbagai aktivitas kolektif lainnya. Kondisi ini membuktikan bahwa semangat pengabdian dan kepedulian sosial pemuda terhadap pembangunan desa sebenarnya cukup tinggi. Oleh karena itu, rendahnya pengaruh pemuda dalam proses perencanaan tidak dapat diartikan

sebagai rendahnya komitmen mereka terhadap pembangunan. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan adanya paradoks partisipasi, yaitu ketika kelompok yang memiliki kontribusi besar dalam pelaksanaan pembangunan justru memiliki pengaruh yang relatif kecil dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri.

Paradoks tersebut memiliki implikasi yang penting terhadap efektivitas pembangunan desa. Pembangunan yang hanya melibatkan pemuda pada tahap pelaksanaan berpotensi kehilangan berbagai gagasan inovatif yang sebenarnya dapat muncul dari perspektif generasi muda. Sebagai kelompok usia produktif yang lebih dekat dengan perkembangan teknologi, informasi, serta dinamika sosial kontemporer, pemuda memiliki kapasitas untuk menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Ketika ruang pengambilan keputusan masih didominasi oleh kelompok tertentu, maka potensi inovasi tersebut tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses penyusunan kebijakan desa. Akibatnya, pembangunan desa cenderung mempertahankan pola yang telah berlangsung sebelumnya daripada menghasilkan terobosan yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda.

Dari sudut pandang teori Hart, kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan partisipatif di Desa Keramat Jaya masih memerlukan transformasi kelembagaan yang lebih mendalam. Transformasi tersebut bukan sekadar meningkatkan jumlah pemuda yang hadir dalam Musrenbangdes, tetapi juga mengubah pola hubungan antara pemerintah desa dan pemuda menjadi hubungan kemitraan. Dalam hubungan kemitraan, pemerintah desa tidak lagi memandang pemuda sebagai kelompok pelaksana pembangunan semata, tetapi sebagai aktor strategis yang memiliki hak, kapasitas, dan tanggung jawab yang sama dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa. Perubahan paradigma ini penting karena pembangunan desa yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi antargenerasi yang saling melengkapi antara pengalaman yang dimiliki oleh generasi tua dengan kreativitas serta inovasi yang dimiliki oleh generasi muda.

Dengan demikian, hasil penelitian ini pada dasarnya memperkuat argumentasi Roger Hart bahwa partisipasi pemuda yang bermakna tidak dapat diwujudkan hanya melalui pelibatan administratif atau kehadiran simbolik dalam

forum musyawarah. Partisipasi yang sesungguhnya mensyaratkan adanya redistribusi ruang dialog, pembagian kewenangan, serta pengakuan terhadap kapasitas pemuda sebagai mitra pembangunan yang setara. Selama pemuda masih lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana daripada sebagai perancang kebijakan, maka kualitas partisipasi akan tetap berada pada tingkat yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya tidak hanya membutuhkan komitmen pemerintah desa untuk mengundang pemuda, tetapi juga keberanian untuk memberikan ruang pengaruh yang nyata bagi mereka dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan desa.

4.4.3 Analisi Temuan Teori Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Apabila dianalisis secara lebih mendalam menggunakan teori Tangga Partisipasi (*Ladder of Citizen Participation*) yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969), hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes Desa Keramat Jaya belum dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang memberikan kekuasaan nyata (*degrees of citizen power*), melainkan masih berada pada tingkat *consultation* yang termasuk dalam kategori *tokenism*. Pada tingkat ini masyarakat memang memperoleh kesempatan untuk hadir dalam forum, menyampaikan pendapat, dan mengemukakan kebutuhan yang dianggap penting, tetapi kesempatan tersebut belum diikuti oleh adanya jaminan bahwa pendapat yang disampaikan akan memengaruhi keputusan akhir. Dengan demikian, partisipasi yang terjadi lebih menekankan pada proses mendengarkan aspirasi masyarakat daripada memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan pembangunan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah Desa Keramat Jaya telah berupaya melibatkan unsur pemuda dalam pelaksanaan Musrenbangdes melalui mekanisme undangan resmi dan pemberian kesempatan untuk mengikuti jalannya musyawarah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam memenuhi ketentuan normatif mengenai pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa kehadiran pemuda dalam forum tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan untuk memengaruhi proses penetapan prioritas pembangunan. Dalam banyak situasi, usulan yang disampaikan oleh pemuda hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan di antara berbagai usulan lainnya, sementara keputusan akhir tetap lebih banyak ditentukan oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat yang memiliki posisi sosial dan politik lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses partisipasi masih bersifat konsultatif, bukan partisipatif dalam arti pembagian kekuasaan.

Menurut Arnstein, *consultation* merupakan bentuk partisipasi yang memberikan ruang komunikasi dua arah, namun hubungan tersebut masih berlangsung dalam posisi yang tidak seimbang. Pemerintah atau pemegang otoritas tetap menguasai proses pengambilan keputusan, sedangkan masyarakat hanya berfungsi sebagai pemberi masukan. Pandangan tersebut sangat relevan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini. Meskipun pemuda diberi kesempatan berbicara dan menyampaikan berbagai usulan pembangunan, tidak terdapat mekanisme yang menjamin bahwa aspirasi tersebut akan diakomodasi dalam dokumen perencanaan desa. Dengan kata lain, penyampaian aspirasi belum otomatis berimplikasi pada perubahan kebijakan. Situasi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang berlangsung masih bersifat prosedural, yakni memenuhi aspek formal pelibatan masyarakat, tetapi belum sepenuhnya memenuhi aspek substantif berupa distribusi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Temuan tersebut juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara partisipasi normatif dan partisipasi substantif. Dari sisi normatif, pemerintah desa telah menjalankan kewajiban administratif dengan melibatkan unsur masyarakat, termasuk pemuda, dalam Musrenbangdes. Kehadiran pemuda sebagai peserta forum menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas telah diupayakan. Namun, dari sisi substantif, kualitas partisipasi belum mencapai kondisi di mana pemuda benar-benar menjadi aktor yang memiliki posisi tawar dalam menentukan arah pembangunan desa. Perbedaan ini menjadi penting karena keberhasilan pembangunan partisipatif tidak hanya diukur dari banyaknya peserta yang hadir,

tetapi juga dari besarnya pengaruh masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, dominasi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam proses diskusi menunjukkan bahwa struktur sosial di tingkat desa masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap kualitas partisipasi. Budaya menghormati tokoh yang lebih tua, kuatnya hubungan patronase, serta persepsi bahwa keputusan pembangunan merupakan kewenangan pemerintah desa menyebabkan sebagian pemuda memilih untuk tidak menyampaikan pendapat secara terbuka. Sikap tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kepedulian pemuda terhadap pembangunan desa, tetapi lebih merupakan bentuk penyesuaian terhadap norma sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, rendahnya kualitas partisipasi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu, melainkan juga sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan budaya yang membentuk perilaku masyarakat dalam forum musyawarah.

Dari perspektif teori Arnstein, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan terletak pada akses memasuki forum Musrenbangdes, melainkan pada distribusi kekuasaan dalam forum tersebut. Arnstein menegaskan bahwa partisipasi yang sesungguhnya hanya akan terwujud apabila masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan, mengawasi implementasi kebijakan, bahkan berbagi kewenangan dengan pemerintah. Selama kewenangan tersebut masih terpusat pada pemerintah desa atau kelompok elite lokal, maka partisipasi masyarakat akan tetap berada pada tingkat tokenism. Oleh karena itu, meskipun pemerintah desa telah membuka ruang komunikasi, ruang tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi ruang deliberatif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara setara.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemuda memiliki antusiasme yang lebih tinggi pada tahap pelaksanaan pembangunan dibandingkan pada tahap perencanaan. Mereka aktif dalam kegiatan gotong royong, pembangunan fasilitas umum, kegiatan sosial, maupun berbagai aktivitas kemasyarakatan lainnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pemuda memiliki komitmen sosial yang kuat terhadap pembangunan desa. Akan tetapi, kontribusi

tersebut lebih banyak diwujudkan dalam bentuk tenaga, waktu, dan pelaksanaan kegiatan daripada dalam bentuk pengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Artinya, pemuda lebih sering ditempatkan sebagai pelaksana program daripada sebagai aktor yang ikut menentukan program.

Apabila dianalisis lebih kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa di Desa Keramat Jaya masih cenderung memanfaatkan kapasitas operasional pemuda tanpa sepenuhnya mengoptimalkan kapasitas intelektual dan inovatif yang mereka miliki. Padahal sebagai kelompok usia produktif, pemuda memiliki potensi besar untuk menghadirkan gagasan baru, memanfaatkan teknologi informasi, serta menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketika ruang partisipasi mereka hanya terbatas pada tahap implementasi, desa kehilangan peluang untuk memanfaatkan perspektif generasi muda dalam merumuskan kebijakan yang lebih inovatif dan berorientasi jangka panjang.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hasil penelitian ini pada dasarnya memperkuat argumentasi Arnstein bahwa partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dipahami sebagai kehadiran fisik atau kesempatan berbicara dalam forum musyawarah. Partisipasi yang berkualitas menuntut adanya redistribusi kekuasaan sehingga setiap kelompok masyarakat, termasuk pemuda, memiliki kesempatan yang sama untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tantangan utama yang dihadapi Desa Keramat Jaya bukan lagi membuka akses kehadiran pemuda dalam Musrenbangdes, melainkan mentransformasikan mekanisme musyawarah dari sekadar konsultasi menuju kemitraan (*partnership*) yang memberikan ruang lebih luas bagi pemuda untuk terlibat dalam penyusunan prioritas pembangunan, perumusan kebijakan, hingga pengawasan pelaksanaannya. Perubahan tersebut menjadi prasyarat penting agar Musrenbangdes benar-benar menjadi forum demokrasi partisipatif yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pemuda dalam proses perencanaan pembangunan desa masih belum berjalan secara optimal. Meskipun pemuda telah dilibatkan secara formal dalam forum Musrenbangdes, namun keterlibatan tersebut cenderung bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda masih berada pada tingkat tokenisme, di mana pemuda hadir dan menyampaikan aspirasi, tetapi belum memiliki ruang yang kuat untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa.

Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai bentuk dan tingkat partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes, penelitian ini menemukan bahwa bentuk partisipasi pemuda lebih dominan pada kehadiran dalam forum musyawarah, penyampaian usulan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial desa. Akan tetapi, keterlibatan tersebut belum sampai pada tahap pengambilan keputusan strategis maupun pengawasan terhadap pelaksanaan hasil Musrenbangdes. Dalam praktiknya, sebagian besar keputusan pembangunan masih dipengaruhi oleh aparat desa dan tokoh masyarakat yang memiliki posisi sosial lebih kuat. Hal ini menyebabkan aspirasi pemuda sering kali belum menjadi prioritas dalam penentuan program pembangunan desa.

Selanjutnya, terkait rumusan masalah kedua mengenai faktor yang mendorong dan menghambat keterlibatan pemuda dalam Musrenbangdes, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong yang mampu meningkatkan partisipasi pemuda. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya semangat sosial dan kepedulian pemuda terhadap pembangunan desa, dukungan dari organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, serta keterbukaan pemerintah desa dalam mengundang pemuda untuk hadir dalam forum

Musrenbangdes. Selain itu, hubungan sosial yang cukup baik antara pemuda dan masyarakat juga menjadi modal sosial yang mendukung keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan desa.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang menyebabkan partisipasi pemuda belum berkembang secara maksimal. Hambatan utama berasal dari rendahnya literasi politik dan pemahaman pemuda mengenai mekanisme Musrenbangdes, minimnya ruang representasi bagi pemuda dalam struktur pengambilan keputusan desa, serta kuatnya budaya senioritas yang menempatkan tokoh tua sebagai pihak yang lebih dominan dalam forum musyawarah. Di samping itu, komunikasi antara pemerintah desa dan pemuda belum berjalan secara efektif, sehingga banyak pemuda yang merasa bahwa pendapat mereka kurang diperhatikan dalam proses pembangunan desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya masih menghadapi tantangan struktural, sosial, dan kultural. Walaupun terdapat potensi besar dari kalangan pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, potensi tersebut belum sepenuhnya difasilitasi melalui mekanisme partisipasi yang inklusif dan deliberatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat untuk memperluas ruang partisipasi pemuda, meningkatkan kapasitas dan literasi politik mereka, serta menciptakan pola komunikasi pembangunan yang lebih terbuka dan kolaboratif agar pemuda tidak hanya menjadi pelengkap dalam Musrenbangdes, tetapi benar-benar menjadi bagian penting dalam proses pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes di Desa Keramat Jaya Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan desa secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.2.1 Saran bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Keramat Jaya diharapkan dapat menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka dan substantif bagi pemuda dalam proses Musrenbangdes. Selama ini keterlibatan pemuda masih cenderung bersifat formalitas dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melibatkan pemuda sejak tahap awal perencanaan, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan usulan program, hingga evaluasi hasil pembangunan.

Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan pola komunikasi dan sosialisasi kepada pemuda terkait fungsi, mekanisme, serta pentingnya Musrenbangdes. Sosialisasi dapat dilakukan melalui forum diskusi desa, pelatihan kepemudaan, media sosial desa, maupun pendekatan langsung melalui organisasi pemuda. Dengan adanya komunikasi yang lebih intensif, pemuda akan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap peran mereka dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa juga disarankan untuk memberikan ruang representasi yang lebih jelas bagi pemuda, misalnya melalui keterlibatan aktif Karang Taruna atau pembentukan forum pemuda desa yang secara khusus menjadi mitra pemerintah dalam proses pembangunan. Langkah ini penting agar aspirasi pemuda tidak hanya didengar, tetapi juga dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan desa.

5.2.2 Saran bagi Organisasi Kepemudaan

Organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna diharapkan mampu memperkuat kapasitas organisasi dan meningkatkan kesadaran politik serta sosial pemuda desa. Organisasi pemuda tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan sosial, tetapi juga harus menjadi wadah pendidikan politik dan pembangunan bagi generasi muda.

Karang Taruna dapat berperan sebagai penghubung antara pemuda dan pemerintah desa dalam menyampaikan aspirasi pembangunan. Selain itu, organisasi kepemudaan perlu mendorong pemuda agar lebih aktif menyampaikan ide, kritik, dan gagasan yang konstruktif dalam forum Musrenbangdes. Dengan penguatan kapasitas organisasi, pemuda akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam proses pembangunan desa.

5.2.3 Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian mengenai partisipasi pemuda, demokrasi lokal, dan pembangunan desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh kehadiran masyarakat dalam forum pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, budaya lokal, modal sosial, dan kapasitas individu.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak desa atau menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat memperdalam aspek kualitas deliberasi, pengaruh budaya lokal terhadap partisipasi politik pemuda, maupun efektivitas kebijakan pemerintah desa dalam memberdayakan generasi muda.

5.2.4 Saran bagi Masyarakat Desa

Masyarakat Desa Keramat Jaya secara umum diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa. Budaya senioritas yang terlalu dominan sebaiknya mulai diarahkan menjadi hubungan kolaboratif antar generasi, sehingga pemuda memiliki ruang untuk belajar, menyampaikan pendapat, dan berkontribusi dalam pembangunan desa.

Keterlibatan pemuda perlu dipandang sebagai bagian penting dalam keberlanjutan pembangunan desa, karena pemuda memiliki potensi, kreativitas, serta perspektif baru yang dapat mendukung kemajuan desa di masa depan. Dengan terciptanya hubungan yang lebih inklusif antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pemuda, maka proses Musrenbangdes dapat menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Artikel Jurnal

- Ali, C. (2023). Keterlibatan perempuan dalam Musrenbang tingkat desa Kota Banda Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 9(1), 53–82.
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners.
- Eka Eka, Widia Astuti, dan Aguswan Aguswan, (2021) “Journal of Election and Leadership (JOELS) Penguatan Kelembagaan Desa dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes Tahun 2021) di Kabupaten Kampar Provinsi Riau,” *Journal of Election and Leadership*.
- Hariyanto. (2022). Analisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes di Desa Kelarik Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Harto, S. P. (2019). *Identifikasi modal sosial dalam pengentasan kemiskinan. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*.
- Geovany, H. D., Rachmawati, I., & Sampurna, R. H. (2024). *Community participation in the development plan of Mande Village, Mande District, Cianjur Regency*. LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies.
- International Journal of Education and Social Science Research. (2019). Social capital has three important dimensions in its application, namely trust, social networks, and norms. *International Journal of Education and Social Science Research*.
- Davis, Keith. (1981). *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- MADANI Indonesia. (2023). *Annex 21: Youth in Civil Society Assessment*.
- Mustaqim, M. H. (2024). Pengembangan Budaya Keagamaan Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Terpadu Bustanul Arifin dan Nurul Islam

- Bener Meriah. *JUMPER: Journal of Educational Multidisciplinary Research*.
- Nadhiro, R. A., & Choiriyah, I. U. (2024). Community Participation in Village Development Planning: Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Indonesian Journal of Public Policy Review*.
- Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*.
- Rajesh Tandon et al., (2014) *KNOWLEDGE AND ENGAGEMENT Building Capacity for the Next Generation of Community Based Researchers Knowledge and Engagement: Building Capacity for the Next Generation of Community Based Researchers*,
- Sherry R Arnstein, (2021) “A Ladder of Citizen Participation,” *The City Reader*, July .
- Siregar, A. Y., & Murhayati, S. (2024). “Metodologi Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konsep, Desain, dan Manfaatnya.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Sulaiman, M., & Nurhaliza, R. (2022). *Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar*. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan dan Politik Lokal*.
- Mikasih, Y., Fitrianti, & Juari. (2024). Youth participation in the development of Gampong Genuren, Bintang Subdistrict, Central Aceh Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 30(1), 48–70.
2. Buku Dalam Bahasa Inggris
- Roger Harts, “Childrens participation” 04 (1992): 5–10,
3. Dokumen, Laporan: institusi, pemerintah, organisasi
- Kementerian PPN/Bappenas “Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda,” SATU DATA INDONESIA, 2021.
- (2025, 2024)

Bangda Kemendagri. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan*.
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa

Regulasi. “Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014

4. Hasil Wawancara

“Wawancara dengan Kepala Dusun Desa Keramat Jaya Bapak Andaria ,Pada
Tanggal 8 Mei 2026,” n.d.

“Wawancara dengan Tokoh Pemuda Desa Keramat Jaya Saudara Pitrada Mahesa,
Pada Tanggal 10 Mei 2026.” n.d.

“Wawancara dengan Ketua Umum Pemuda Kampung Keramat Jaya Izkala Fajri,
Pada tanggal 8 Mei 2026.” n.d.

”Wawancara dengan Perangkat Desa Sekaligus Menjadi Tim 11 Saat Pelaksanaan
Musrenbangdes Bapak Dianto,Pada Tanggal 8 Mei 2026.” n.d.

“Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Keramat Jaya Bapak Sabran, Pada
Tanggal 9 Mei 2026.” n.d.

“Wawancara dengan Salah Satu Pemuda Desa Keramat Jaya Reza Agung
Kurniawan, Pada Tanggal 10 Mei 2026.” n.d.

A R - R A N I R Y

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Informan	Pertanyaan
1	Perangkat Desa	1. Apa yang Anda ketahui tentang Musrenbangdes dan Menurut Anda, apa tujuan diadakannya Musrenbangdes? 2. Seberapa penting Musrenbangdes bagi pembangunan desa menurut Anda? 3. Apakah pemuda perlu terlibat dalam Musrenbangdes? Mengapa? 4. Menurut Anda, bagaimana tingkat keikutsertaan pemuda dalam Musrenbangdes di desa ini? 5. Bagaimana peran pemerintah desa apakah sudah cukup melibatkan pemuda? 6. Apakah ada pengalaman negatif yang membuat pemuda enggan ikut? 7. Apakah pendapat pemuda biasanya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan? 8. Apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait partisipasi pemuda dalam Musrenbangdes?

2	Tokoh Pemuda	1. Apakah Anda pernah ikut serta dalam Musrenbangdes di desa ini? 2. Dalam bentuk apa saja Anda berpartisipasi? (misalnya: hadir, memberi usulan, diskusi, menjadi panitia, dll) 3. Apakah Anda pernah menyampaikan usulan dalam Musrenbangdes? 4. Jika ya, usulan seperti apa? 5. Apakah usulan tersebut ditanggapi? 6. Apakah ada faktor budaya atau kebiasaan yang membatasi peran pemuda? 7. Apa harapan Anda terhadap Musrenbangdes ke depan?
3	Tokoh Masyarakat	1. Apakah Anda pernah ikut serta dalam Musrenbangdes di desa ini? 2. Apakah Anda pernah menyampaikan usulan dalam Musrenbangdes? 3. Apa yang membuat Anda atau pemuda lain tertarik untuk ikut Musrenbangdes? 4. Seberapa besar peran pendidikan atau pengetahuan dalam mendorong partisipasi? 5. Apa harapan Anda terhadap Musrenbangdes ke depan?

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Keramat Jaya



Wawancara Dengan Perangkat Desa (Kepala Dusun) Desa Keramat Jaya



Wawancara Dengan Perangkat (Sekretaris Desa) Desa Keramat Jaya



Wawancara Dengan Ketua Pemuda Desa Keramat Jaya



Wawancara dengan Salah satu Pemuda Desa Keramat Jaya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y